



DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
JL. RAJA HAJI NO.5 SEKUPANG - BATAM



LKjIP - 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 dapat diselesaikan. Tahun ini adalah tahun awal mewujudkan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kota Batam ini pada dasarnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan kepada stakeholder mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kota Batam disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan Kota Batam akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja tahun depan secara lebih produktif, efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kebijakan yang telah ditetapkan

Batam, Februari 2023

**Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam**





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
IHTISAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Gambaran Umum Wilayah Kerja	I-3
1.4. Gambaran Umum Dinas Perikanan	I-5
1.5. Sistematika dan Kerangka Penyusunan LKjIP	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis.....	II-1
A. Visi dan Misi.....	II-1
B. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-3
C. Indikator Kinerja Utama	II-7
2.2. Perjanjian Kinerja	II-9
2.3. Program dan Kegiatan	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	III-2
B. Pencapaian Kinerja Renstra Sampai Dengan Tahun 2021	III-21
3.2. Realisasi Anggaran	III-23
Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2021	III-23
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020	IV-1
4.2. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2020	IV-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah SDM Menurut Jabatan Tahun 2021.....	I-8
Tabel 1.2	Jumlah SDM Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2021.....	I-8
Tabel 1.3	Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021	I-9
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan	II-4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021	II-7
Tabel 2.3	Target Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021.....	II-9
Tabel 2.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan.....	II-12
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III-2
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	III-3
Tabel 3.3	Peningkatan Jumlah Produksi Tahun 2017-2021	III-3
Tabel 3.4	Capaian Indikator Pendukung Produksi Perikanan Tangkap	III-4
Tabel 3.5	Peningkatan Jumlah Armada Tahun 2017-2021.....	III-4
Tabel 3.6	Jumlah Alat Tangkap Ikan Berdasarkan Jenis	III-5
Tabel 3.7	Capaian Indikator Pendukung Produksi Perikanan Budidaya	III-6
Tabel 3.8	Luas Lahan Produktif dan Jumlah RTP Aktif Budidaya.....	III-6
Tabel 3.9	Jumlah Saprasi Budidaya dan RTP Budidaya Menggunakan Bibit Unggul.....	III-7
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	III-8
Tabel 3.11	Konsumsi Ikan dan Jumlah Produksi Olahan Perikanan.....	III-8
Tabel 3.12	Jumlah Saprasi Pengolahan Tahun 2017-2021.....	III-9
Tabel 3.13	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan.....	III-10
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	III-11
Tabel 3.15	Jumlah Tabungan Nelayan Asuransi Madani	III-12
Tabel 3.16	Indikator Pendukung Presentase Hasil tangkapan	III-13
Tabel 3.17	Jumlah Saprasi Tangkap Ikan Ekonomis Penting.....	III-13
Tabel 3.18	Indikator RTP Tergabung dalam Kelompok.....	III-14



Tabel 3.19	Jumlah kelompok yang Dibina Tahun 2017-2021	I-14
Tabel 3.20	Capaian Indikator Jumlah Surat/Rekomendasi	III-15
Tabel 3.21	Jumlah BBM yang Direkomendasikan Tahun 2017-2021	III-16
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	III-17
Tabel 3.23	Jumlah Pelaku Usaha terlayani Tahun 2017-2021	III-18
Tabel 3.24	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 dibanding dengan Target pada Perjanjian Kinerja	III-19
Tabel 3.25	Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 dibanding dengan Target renstra.....	III-23
Tabel 3.26	Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	III-24
Tabel 3.26	Anggaran, Realisasi, dan Sisa Anggaran Tahun 2021.....	III-25
Tabel 3.28	Tabel Analisa Efisiensi Kegiatan Tahun 2021.....	III-26
Tabel 3.29	Analisa Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Tahun 2021.....	III-27
Tabel 3.30	Capaian Realisasi Keuangan	III-31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Batam	I-4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam	I-7
Gambar 3.1	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	III-23



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD Kota Batam 2021-2026 dan Renstra Dinas Perikanan Kota Batam 2021-2026. Dinas Perikanan Kota Batam merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pencapaian Misi Pertama: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah, Tujuan kedua: Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif, Sasaran ke-enam: Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya.

Untuk mewujudkan amanah RPJMD tersebut, ditetapkanlah **Tujuan Dinas Perikanan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan** dengan indikator pengukuran kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN). Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan pula **Sasaran Dinas Perikanan yaitu: Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan** Indikator pengukuran kinerja yaitu:

- Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil;
- Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan;
- Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan.

Keempat indikator tersebut telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam.

Pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Capaian 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 seluruhnya berpredikat "**SANGAT TINGGI**".
- Capaian indikator kinerja utama dibandingkan dengan target Renstra sebagai berikut:
 - Nilai Tukar Nelayan (NTN) telah mencapai 98,14%;
 - Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil telah mencapai 20%;
 - Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan telah mencapai 20%;
 - Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan telah mencapai 20%.

Dalam rangka merealisasikan tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Perikanan Kota Batam 2021-2026, pada 2022 dilaksanakan Program dan kegiatan yang meliputi 4 (empat) program yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan. Dari hasil analisis tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan, diperoleh kesimpulan bahwa sebanyak 9 (Sembilan) kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Tahun 2022, terdapat 6 (enam) kegiatan yang **Kurang efisien**, 1 (tiga) **Efisien**, dan terdapat 2 (dua) kegiatan yang **Sangat Efisien**. Sedangkan efektivitas terhadap 9 (sembilan) kegiatan tersebut semuanya efektif.

KINERJA KEUANGAN

Pagu anggaran belanja langsung APBD Kota Batam T.A. 2022 yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Batam untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target Indikator kinerja Tahun 2022 sebesar Rp. 12.908.604.724 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.086.625.166 (*Dua Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*) capaian **93,63%**.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan strategis pada tahun 2022 dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja terhadap semua Kepala Bidang, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional serta seluruh staf pada awal tahun anggaran 2022 untuk membuat pernyataan kontrak kinerja berjenjang (Cascading) sebagai wujud komitmen dan kesungguhan untuk bekerja secara amanah, professional dan peduli dalam rangka mewujudkan target indikator kinerja utama (IKU) Tahun 2022 dan target indikator kinerja aparatur PNS. Evaluasi cascading dilaksanakan setiap triwulan dan disupervisi langsung oleh Kepala Dinas. Pengumpulan data kinerja cascading dilaksanakan berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka Dinas Perikanan Kota Batam berkomitmen kuat dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) sebagai penjabaran amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang memberikan gambaran seluas dan seobyektif mungkin mengenai tingkatan pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam, diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Kota Batam adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan pada Dinas Perikanan Kota Batam atas penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya dalam rangka pencapaian target kinerja yang sudah diperjanjikan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Batam adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2022, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
- b. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi Dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Batam adalah:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
 - b. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
 - c. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;
 - d. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang Perikanan
-

1.3 GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA

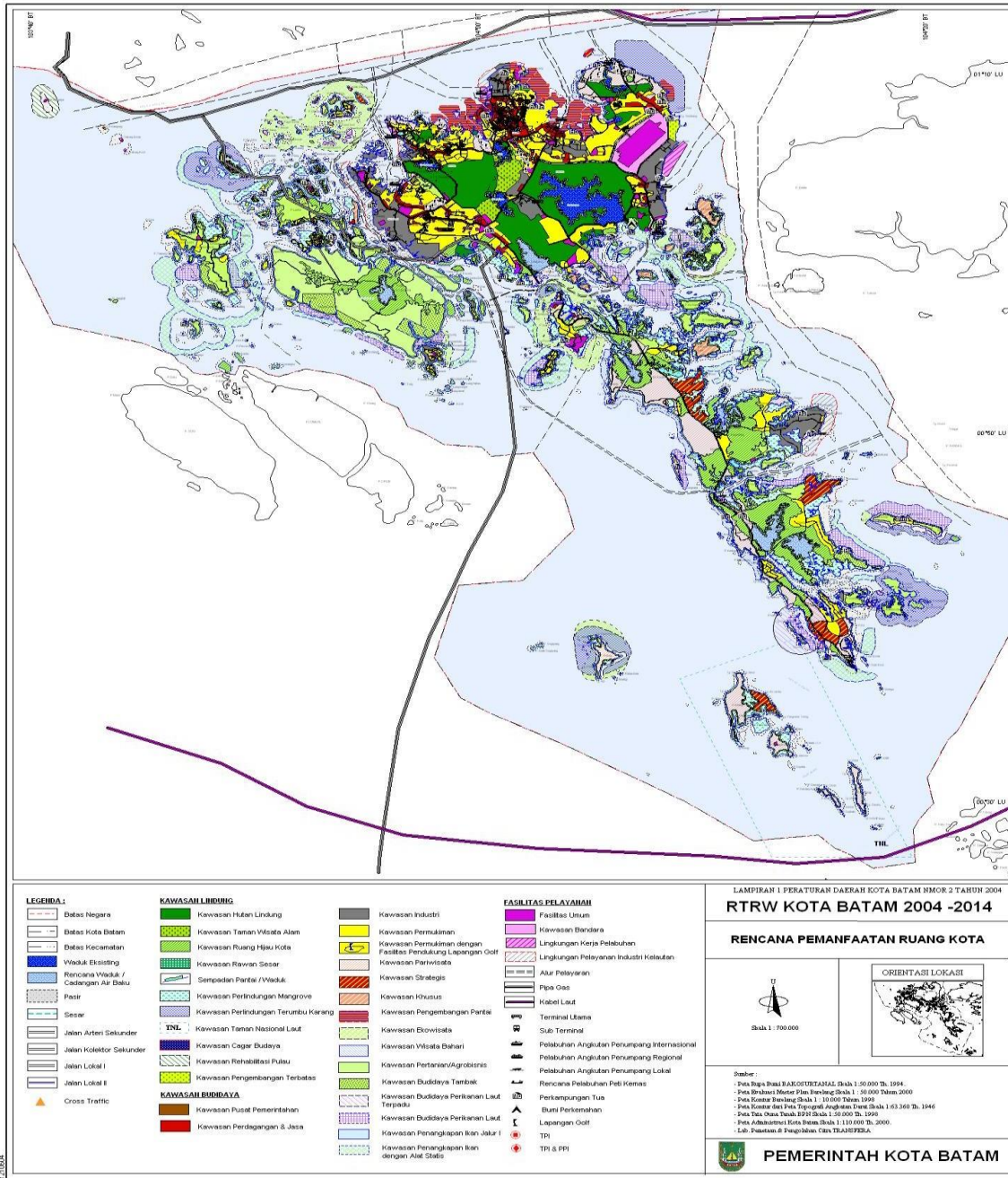
Kota Batam merupakan Daerah Otonom yang dibentuk bersama 7 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Wilayah Kota Batam memiliki luas daratan 1.038,84 Km² dan luas wilayah perairan 2.791,09 Km² yang mencakup 6 pulau besar yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Bulan, Pulau Kepala Jeri, dan dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar perbatasan negara beberapa gugus pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Secara Administratif, Kota Batam memiliki 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Sekupang, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Bengkong. Wilayah Kota Batam ini terdiri lebih yang dihuni oleh 1.329.773 jiwa penduduk pada Tahun 2018.

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 – 2014, secara geografis wilayah Kota Batam terbentang antara 0°25'29" LU – 1°15'00" LU dan 103°34'35" BT – 104°26'04" BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Singapura
- Sebelah Timur : Pulau Bintan
- Sebelah Selatan : Kab. Lingga
- Sebelah Barat : Semenanjung Karimun, Kab. Karimun

Gambar1.1 Peta Kota Batam



1.4 Gambaran Umum Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kota Batam merupakan pemisahan dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam yang baru dibentuk pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perikanan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam No.78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Adapun Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan Peraturan Walikota Batam No.24 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan sebagai berikut:

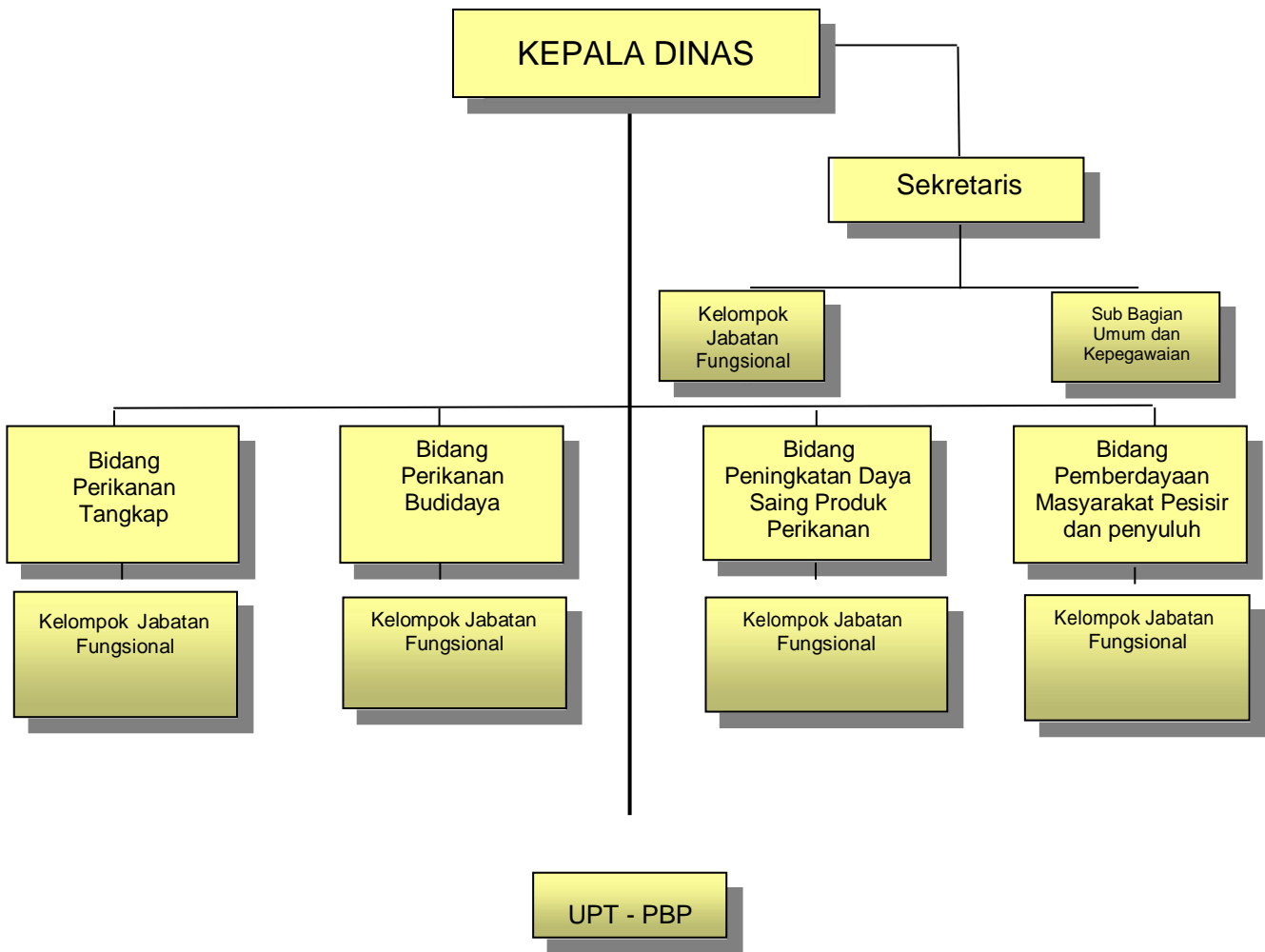
- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung-jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.
- 3) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh 1 orang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perikanan Tangkap, termasuk di dalamnya:
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Tangkap.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Tangkap.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Tangkap, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Tangkap.
- 4) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang perikanan budidaya, termasuk didalamnya:
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup Perikanan Budidaya.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perikanan Budidaya.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perikanan Budidaya, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perikanan Budidaya

- 5) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh, termasuk didalamnya:
 - a) Penyusunan rencana dan program lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
 - c) Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, dan
 - d) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan penyuluh, termasuk didalamnya:
 - a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan public dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh, dan
 - d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Bidang Perikanan tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Batam, UPT Pelayanan Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pelayanan Perikanan serta tugas lain yang diberikan kepala dinas sebagaimana tertuang dalam Perwako No. 19 tahun 2018.

1. Struktur Dinas

Sebagaimana diatur dalam Perwako No. 78 Tahun 2021 bahwa Dinas Perikanan Kota Batam memiliki struktur organisasi seperti pada gambar 1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Batam



2. Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kota Batam dalam menjalankan fungsi dan tugasnya didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni dengan jenjang pendidikan Sarjana (Strata satu/S1 dan Strata dua/S2) 77,92%, Diploma 3,89%, dan 18,18% SLTA/SLTP. Terdiri dari 50 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 32 orang Tenaga Harian Lepas.

Tabel 1.1 Jumlah SDM Menurut Jabatan Tahun 2022

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	1

5.	Kepala Unit Pelayanan Terpadu	1
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu	1
7.	Fungsional	14
8.	Pelaksana/Staf	27
9.	Tenaga Kontrak Administrasi	18
10.	Tenaga Kontrak Pendamping Lapangan	14
Total		82

Tabel 1.2 Jumlah SDM Menurut Pangkat/Golongan Tahun 2022

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina/IV	5
2.	Penata/III	38
3.	Pangatur/II	7
4.	Tenaga Kontrak	32
Total		82

Tabel 1.3. Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2/Pasca Sarjana	6
2.	Strata 1/Sarjana/DIV	60
3.	Diploma III	4
4.	SLTA/Sederajat	11
5.	SLTP/Sederajat	1
T o t a l		82

3. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan Belanja Operasional Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 dari alokasi dana APBD Kota Batam sebesar Rp.13.135.404.724 (tiga belas milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), mengalami pengurangan di Perubahan APBD 202 sebesar Rp 12.908.604.724 (dua belas milyar sembilan ratus empat juta enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh

empat rupiah) untuk 4 (empat) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.

4. JARINGAN STAKEHOLDER PERIKANAN

Jaringan stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan Kota Batam meliputi :

- a. Nelayan Kecil
- b. Pembudidaya Ikan
- c. Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan
- d. Industri Pengolah Ikan, dan
- e. Kelembagaan (Kelompok) usaha perikanan

Tabel 1.4. Jumlah Kelompok Usaha Perikanan Tahun 2018 - 2022

NO.	KELOMPOK	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Usaha Bersama (KUB)	493	680	724	793	793
2.	Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)	234	234	241	298	298
3.	Pengolah dan Pemasar Ikan (POKLAHSAR)	100	136	143	150	150
JUMLAH		827	1.050	1.108	1.241	1.241

5. ISU STRATEGIS OPD TAHUN 2022

Isu strategis yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kegiatan perikanan yang berkelanjutan di Kota Batam meliputi:

1. Aspek Pandemi Global Corona Virus 19 yang masih memberikan pengaruh berupa:
 - Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan.
 - Berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam yang mengakibatkan berkurangnya pagu anggaran Dinas Perikanan.
2. Aspek Ekonomi
 - Naiknya harga BBM subsidi sehingga meningkatnya biaya produksi nelayan.
 - Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah
 - Kurang berkembangnya pasar domestic dan pengamanan kualitas ikan
 - Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas
3. Aspek Sosial
 - Kualitas SDM Nelayan, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah
 - Teknologi dan system produksi yang terbatas
4. Aspek Lingkungan
 - Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai
 - Penurunan Kualitas lingkungan/perairan
5. Aspek Kelembagaan
 - Kualitas kelompok Nelayan (KUB, POKDAKAN, dan POKLAHSAR) masih rendah
 - Kualitas dan Kuantitas tenaga pendamping lapangan perikanan masih rendah
 - Sistem pendataan perikanan yang belum maksimal

Isu-isu strategis tersebut diatas berdampak terhadap pembangunan di bidang perikanan di Kota Batam dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengaruh wabah corona virus disease 2019 (COVID-19) berpengaruh meski sudah melandai, terutama terhadap factor pariwisata di Kota Batam. Permintaan ikan oleh restoran masih belum pulih 100 persen karena kunjungan turis mancanegara yang juga belum kembali 100 persen.
2. Kenaikan harga BBM bersubsidi dimana semula BBM jenis premium dengan harga Rp. 6.400,- per liter ditiadakan lalu diganti dengan BBM jenis pertalite dengan harga Rp. 7.000,- per liter. Kemudian pada September 2023 harga BBM jenis pertalite naik menjadi Rp. 10.000,- per liter. Kenaikan harga BBM tersebut mempengaruhi biaya operasional nelayan sehingga mempengaruhi pendapatan mereka. Di sisi lain nelayan tidak bias menaikkan harga ikan sesuai dengan kenaikan harga BBM karena terbentur dengan daya beli masyarakat.
3. Kenaikan harga dollar terutama Dolar Singapura rata-rata 8,8% pada Tahun 2022 di satu sisi memberikan keuntungan kepada nelayan Kota Batam yang mengekspor hasil tangkapannya ke Singapura karena harga penjualan ikan berpatokan kepada Dolar Singapura. Semakin naik nilai Dollar Singapura maka semakin besar nilai yang diterima nelayan jika dikurskan dengan nilai Rupiah.
4. Daya saing produk perikanan baik tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang masih rendah.

Produk-produk perikanan mempunyai daya saing yang rendah dibandingkan dengan produk pangan lain seperti daging sapi dan ayam. Permasalahan yang terjadi dikarenakan usaha perikanan yang belum efisien maupun kontinuitas produksi yang tidak stabil. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah pada produk perikanan.

Dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produk olahan perikanan adalah berkurangnya lapangan kerja, yang diiringi menurunnya pendapatan masyarakat. Secara global juga akan berpengaruh pada PAD.

5. Akses Permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya maupun hasil olahan yang terbatas

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi

masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar produk perikanan yang sebagian besar merupakan pelaku usaha skala kecil. Selain itu suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan di Kota Batam. Dampak dari terbatasnya akses permodalan usaha bagi nelayan adalah sulitnya perkembangan usaha perikanan atau cenderung stagnan. Di sisi lain terbatasnya akses permodalan bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil juga menyebabkan pemanfaatan sumberdaya ikan yang tidak berimbang dan optimal.

6. Kualitas SDM Nelayan Tangkap, Pembudidaya ikan dan Pengolah/pemasar hasil perikanan yang masih rendah.

Pekerjaan nelayan, pembudidaya ikan merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan dan pembudidaya ikan tidak dibutuhkan persyaratan atau ketrampilan tertentu. Sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan ketrampilan dalam menangkap ikan dan budidaya ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan hingga pemasarannya, masih sangat terbatas. Hal ini memberikan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap kehidupan para nelayan dan pembudidaya ikan terutama di musim panceklik. Sementara, untuk para nelayan skala kecil dan pembudidaya ikan yang beroperasi secara mandiri, mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menentukan harga ikan hasil tangkapannya maupun hasil budidayanya. Hal tersebut karena mereka umumnya bekerja secara sendiri sendiri dan tidak bekerja dalam satu serikat usaha bersama. Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut menyebabkan terjadinya kesulitan untuk mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya ikan yang bertanggungjawab terkait dengan kurangnya kualitas nelayan dan pembudidaya ikan, sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi. Kemudian dari sisi sosial-ekonomi, tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya skala kecil juga akan sulit untuk ditingkatkan karena mereka mempunyai kemampuan yang terbatas dalam manajemen usaha, sehingga di saat musim panen akan menghamburkan pendapatannya dan di musim panceklik mencari pinjaman untuk menutupi kekurangan pendapatannya.

7. Teknologi dan system produksi yang terbatas

Pelaku usaha perikanan yang pada umumnya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang usaha perikanan yang berkelanjutan dan juga belum memiliki skala usaha yang layak. Akses terhadap teknologi masih terbatas dan umumnya masih menerapkan system tradisional dan atau system semi intensive. Akibatnya tidak sedikit

pelaku usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, yang melakukan praktik-praktik usaha perikanan yang tidak berkelanjutan, bahkan beberapa masih ada yang menggunakan alat tangkap atau bahan-bahan yang berbahaya bagi sumber daya ikan, lingkungan, dan manusianya. Terlebih lagi ditambah dengan skala usaha ekonomi mereka yang belum layak, sehingga para pelaku usaha perikanan tersebut lebih cenderung untuk mengejar kuantitas produksi semata, tanpa memperhatikan daya dukung ekosistemnya. Selain itu Permasalahan produksi dan teknologi ini juga berkaitan dengan penyediaan teknologi pembenihan yang masih belum sepenuhnya memadai karena belum terpecahkannya masalah transportasi benih, penyediaan pakan buatan dan penguasaan teknik pembasmian penyakit di tingkat pembudidaya ikan. Selain itu pengembangan usaha budidaya laut dalam karamba jaring apung (KJA) masih mengalami berbagai kendala antara lain belum adanya tata ruang pengembangan budidaya, belum dikuasainya teknologi, belum tercukupinya pasok benih dan sarana produksi lain seperti pakan dan obat-obatan serta belum terkendalinya masalah lingkungan dan penyakit.

8. Padat Tangkap (overfishing) di perairan pantai

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar kegiatan perikanan di Kota Batam merupakan usaha skala kecil dengan ukuran kapal kurang dari 3 GT yang beroperasi di hampir semua pesisir Kota Batam. Hal ini utamanya disebabkan kondisi sosial masyarakat pesisir yang memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun SDM. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya kebijakan "limited access" secara menyeluruh, sehingga hingga saat ini belum terjadi pembatasan baik armada penangkapan, alat tangkap maupun jumlah dan jenis tangkapan. Permasalahan yang terjadi di atas menyebabkan terjadinya dampak negative berupa terganggunya ekosistem pantai yang merupakan sumber trophic level, sehingga dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan kehancuran sumberdaya bahkan kepunahan ikan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberlanjutan perikanan akan berhubungan antara beberapa aspek, jika sumberdaya mengalami kehancuran yang merupakan kehancuran lingkungan maka akan berdampak pula terhadap degradasi usaha perikanan rakyat.

9. Penurunan Kualitas Lingkungan/Perairan

Permasalahan lingkungan/perairan disebabkan oleh pencemaran lingkungan seperti pencemaran laut dan aktivitas manusia, degradasi tanah dengan segala aspek komplikasinya dalam kurun waktu yang panjang. Meskipun potensi perikanan kita tinggi namun tidak semua sumberdaya tersebut dapat dikembangkan untuk perikanan.

Dalam pengembangan budidaya perikanan misalnya, selain mempertimbangkan kesesuaian tempat juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Daya dukung tersebut diantaranya ditentukan oleh mutu perairan dan tanah, sumber air, arus dan pasang surut, topografi dan klimatologi, dan lain-lain. Tidak dipenuhinya daya dukung lingkungan disebabkan oleh pencemaran laut seperti karena penggunaan transportasi, aktivitas manusia di daratan seperti pembuangan limbah baik rumah tangga, industri, pertanian dan peternakan. penebangan hutan (erosi yang menimbulkan pelepasan dan dekomposisi bahan-bahan kimiawi yang mengalir terbawa aliran air hujan dan sungai, pengelolaan pemanfaatan perairan yang kurang baik yang dapat menimbulkan umbalan (upwelling) yang terjadi karena fenomena alam berupa perubahan suhu yang mengakibatkan terbawanya materi dasar ke permukaan.

10. Sistem pendataan perikanan yang belum maksimal.

Pendataan perikanan termasuk hal utama yang harus diatasi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pendataan perikanan merupakan input utama dalam menentukan pengambilan kebijakan yang akan dilakukan kemudian. Saat ini pencatatan data perikanan belum maksimal serta masih parsial. Penyebabnya utamanya adalah belum dibangunnya sistem basis data yang komprehensif dan bersifat pro-aktif. Selain itu, juga karena terbatasnya SDM pengelola data perikanan dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengelolaan sistem basis data dan informasi perikanan. Dampak yang dihasilkan dari ketidakakuratan data perikanan adalah terciptanya rumusan kebijakan pembangunan perikanan yang tidak tepat sasaran, sehingga menghasilkan pengelolaan yang salah.

Tantangan dan Peluang Dinas Perikanan Kota Batam

1. Mewujudkan daya saing terhadap produk perikanan, baik hasil tangkap, hasil budidaya maupun hasil olahan perikanan
2. Terbatasnya kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan untuk pengembangan usaha
4. Terbatasnya fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan
5. Pengumpulan, Kompilasi dan analisis data perikanan yang belum akurat

Mengacu kepada lima tantangan yang disampaikan di atas, berikut adalah lima rekomendasi yang dapat disampaikan :

1. Meningkatkan daya saing produk perikanan, baik hasil tangkap, hasil budidaya maupun hasil olahan perikanan
2. Meningkatkan kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan perikanan
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan untuk mengembangkan usaha bagi pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, pengolah/pemasar hasil perikanan.
4. Meningkatkan fasilitas/infrastruktur di bidang perikanan
5. Pengelolaan sistem basis data dan informasi perikanan

1.5 Sistematika dan Kerangka Penyusunan LKjIP

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam.

Bab I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang, maksud, tujuan dan manfaat, gambaran umum wilayah kerja, gambaran Umum Dinas Perikanan Kota Batam; isu strategis OPD Tahun 2019, sistematika dan kerangka Penyusunan LkjIP.

Bab II PERENCANAAN KINERJA, pada bab ini berisi perencanaan strategis Dinas Perikanan Kota Batam 2016-2021 Perubahan dan penetapan kinerja tahun 2019.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, pada bab ini disajikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada sub bab capaian kinerja disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau tahun awal Renstra;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Capaian kinerja Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV PENUTUP, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari LKjIP Dinas Perikanan Kota Batam dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis adalah langkah awal yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menentukan strategi. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam hal anggaran dan sumber daya manusianya untuk mencapai target kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja harus mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Disisi lain pegawai juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan internal maupun peran eksternal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.

A. Visi dan Misi

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum Peraturan Daerah Kota Batam Peraturan Daerah Kota Batam No. 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera”** dan untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka dirumuskan dalam 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah;



2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan didukung Infrastruktur, Utilitas dan Sistem Transportasi yang Maju, Ramah, Aman, Asri dan Nyamansesuai Tata Ruang;
3. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan BerakhlakMulia;
4. Melanjutkan Percepatan pembangunan di Daerah Hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif dan Efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan misi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026, Dinas Perikanan diberi amanat untuk mendukung pencapaian misi pertama RPJMD Kota Batam yaitu: “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah.”

Untuk mencapai Misi Pertama ini sebagaimana yang tercantum di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ditetapkan dua tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang berdaya saing.
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif.
Untuk mencapai dua tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran, yaitu:
 1. Meningkatnya kinerja sektor perdagangan.
 2. Tumbuhnya sektor Pariwisata Unggulan di Kota Batam.
 3. Meningkatnya Realisasi Investasi Kota Batam
 4. Meningkatnya produktifitas industri kecil menengah dalam perekonomian daerah.
 5. Meningkatnya peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam Perekonomian Daerah;
 6. Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya



7. Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah

Terkait dengan dengan tujuan dan sasaran Kota Batam Tahun 2021-2026, Dinas Perikanan Kota Batam diberikan amanah untuk mendukung tercapainya Tujuan kedua yaitu Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang Merata dan Inklusif dan mendukung tercapainya sasaran ke-6 yaitu Meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya.

Untuk mewujudkan sasaran ke-6 yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD tersebut, Dinas Perikanan Kota Batam menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil dan budidaya. Oleh sebab itu program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2021-2026 difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan.

B. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran ke-6 yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD tersebut, Dinas Perikanan Kota Batam menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, Dinas Perikanan menetapkan sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam table berikut :



Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan.	Nilai Tukar Nelayan (NTN) 1. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil.	1.1. Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap. 1.1.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perikanan dan Penyediaan Data/Informasi Perikanan Tangkap. 1.1.3 Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Nelayan Kecil. 1.1.4 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan usaha bagi nelayan kecil. 1.1.5 Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<p>2. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan</p> <p>3. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan</p>	<p>2.1 Mengoptimalkan Pengelolaan Perikanan Budidaya.</p> <p>3.1 Mengoptimalkan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.</p>	<p>1. Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya.</p> <p>2. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.</p> <p>3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan.</p> <p>4. Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil.</p> <p>5. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.</p> <p>6. Penyediaan Data/Informasi Perikanan Budidaya.</p> <p>1. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan.</p> <p>2. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha olahan hasil Perikanan Skala Mikro.</p> <p>3. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.</p>



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
				4. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.



C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perikanan dalam mencapai tujuan dan sasaran periode 2021-2026, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang tercantum pada table berikut.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2022

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
					2022		
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN). (Difokuskan kepada nelayan kecil)	(indeks yang diterima nelayan / indeks yang dikeluarkan nelayan) x 100	100,3	101	Laporan statistik perikanan	Seluruh Bidang
2	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	1. Persentase peningkatan produksi nelayan kecil	[(jumlah produksi nelayan kecil tahun n – jumlah produksi nelayan kecil tahun n-1) / jumlah produksi nelayan kecil tahun n-1] x 100%	1,01	1	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh



	2. Persentase peningkatan produksi produksi pembudidaya ikan	[(jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n – jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n-1) / jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n-1] x 100%	2,12	2	Laporan statistik perikanan	Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh
	3. Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan	[(jumlah produksi pengolahan hasil perikanan tahun n – jumlah produksi pengolahan hasil perikanan tahun n-1) / jumlah produksi pengolahan hasil perikanan tahun n-1] x 100%.	-12,08	1		Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.



Terkait Tujuan Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan yang menggunakan nilai tukar nelayan (NTN) sebagai indikator meski kinerja juga meliputi kesejahteraan pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pelaku utama yang dominan pada sector perikanan di Kota Batam adalah nelayan. Selain itu sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan terutama budidaya laut dan pengolah hasil perikanan adalah anggota rumah tangga nelayan yang melakukan usaha alternative. Oleh sebab itu NTN dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan di Kota Batam.

2.2. Perjanjian Kinerja

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk membuat Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja dibuat secara hirarki secara tertulis dari Kepala Dinas Perikanan Kota Batam kepada Walikota Batam, kemudian dari staf/pelaksana kepada pejabat eselon 3, pejabat fungsional kepada eselon 3, pejabat eselon 3 kepada kepala dinas. Perjanjian Kinerja merujuk pada capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kota Batam yang mengacu pada Renstra Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2021- 2026 berikut perubahannya. Perjanjian Kinerja berisi pelaksanaan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kota Batam pada Tahun 2022 berikut indikatornya. Adapun substansi yang diperjanjikan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra, target kinerja, tolok ukur indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan (Input, Output, dan Outcome) sesuai dokumen DPA-OPD yang menjadi tanggung jawab Pimpinan Unit Kerja. Uraian dari tujuan, sasaran, indikator kinerja utama dan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kepala Dinas (Eselon II) sebagai mana tertera dalam tabel di bawah dan setiap Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Staf/Pelaksana Dinas Perikanan sebagaimana dalam halaman lampiran.



Tabel 2.3 Target Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan	Nilai Tukar nelayan (NTN)	Nilai	101
2.	Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan	Persentase peningkatan produksi nelayan kecil	%	1
		Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan	%	2
		Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan	%	1

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan Kota Batam, untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana table 2.3 diatas maka Dinas Perikanan Kota Batam melaksanakan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Batam tahun 2021 - 2026. Adapun rencana program dan kegiatan urusan bidang perikanan di tahun anggaran 2022 sebagai diuraikan di bawah ini.

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap diarahkan untuk meningkatkan produksi nelayan kecil di Kota Batam sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan kecil dengan harapan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi nelayan kecil di Kota Batam. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:



- a. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota.
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan untuk meningkatkan produksi pembudidaya ikan di Kota Batam sehingga dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan dengan harapan berdampak pada kesejahteraan pembudidaya ikan di Kota Batam. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diarahkan untuk meningkatkan produksi pengolahan hasil perikanan di Kota Batam sehingga meningkatkan pendapatan pengolah hasil perikanan dengan harapan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan pengolah hasil perikanan di Kota Batam. Adapun rencana kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.



- b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dapat tercapai sehingga urusan perikanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dapat terlaksana dengan baik.

Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.



- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kelompok Sasaran; Kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam adalah nelayan kecil, pembudidaya Ikan, Pengolah dan pemasar hasil perikanan dan unit pengolahan ikan (UPI).

Lokasi Penyebaran Program dan Kegiatan; Lokasi penyebaran program dan kegiatan meliputi seluruh wilayah Kota Batam baik mainland maupun yang berada di hinterland (pulau-pulau).

Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif; Adapun Pagu indikatif yang direncanakan untuk pelaksanaan program kegiatan tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 12.908.604.724,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)**. Adapun rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 dirinci dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2022			
			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil	19.954 ton	20.355 ton	1.601.015.260,-	APBD	Kota Batam
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	21 kelompok	3 kelompok	1.601.015.260,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	500 orang	54 orang	1.501.951.370,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	42 kelompok	45 kelompok	49.673.700,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	1.500 unit usaha	1.000 unit usaha	49.390.190,-	APBD	Kota Batam
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7.235 ton	7.527 ton	364.093.400,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				364.093.400,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 dokumen	4 dokumen	34.993.400,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	140 unit	18 unit	296.250.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	NA	6 dokumen	32.850.000,-	APBD	Kota Batam

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2022			
			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1.290,49 ton	1.316.43 ton	310.441.180,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				35.638.020,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap penerapan Persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko			35.638.020,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				274.803.160,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				234.710.110,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.093.050,-	APBD	Kota Batam
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	10.633.054.884,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	8.643.286.436,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.597.946.436,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45.340.000,-	APBD	Kota Batam

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2022			
			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	169.893.928,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.085.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42.382.650,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.253.678,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				17.122.600,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				93.050.000,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	107.905.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengadaan Meubel				38.005.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				37.500.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.400.000,-	APBD	Kota Batam
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1.550.239.520,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				133.820.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.416.419.520,-	APBD	Kota Batam

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Rencana Tahun 2022			
			Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 12 bulan	100 %	100 %	161.730.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				144.800.000,-	APBD	Kota Batam
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				16,930,000,-	APBD	Kota Batam
JUMLAH				12.908.604.724,-		



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja Organisasi diukur berdasarkan tingkat capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis OPD beserta capaian target tiap bidang yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Pengukuran kinerja penting untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan dan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kota Batam dalam dokumen ini mengandung pengertian kondisi/tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan misi yang diamanahkan masyarakat Kota Batam.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran. Hasil pengukuran terhadap kinerja merupakan evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pengukuran yang disepakati. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara realisasi indikator kinerja dengan target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk mempermudah interpretasi atas tingkat pencapaian indikator kinerja, digunakan dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Kode Predikat Kinerja
1.	≥91%	Sangat tinggi	
2.	76% - 90%	Tinggi	
3.	66% - 75%	Sedang	
4.	51% - 65%	Rendah	
5.	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017



Makna kriteria penilaian capaian kinerja tersebut atas maksudnya adalah:

(1) Sangat Tinggi dan Tinggi

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Sedang

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Rendah dan Sangat Rendah

Menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

I. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Tahun 2022 merupakan tahun kedua melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan **Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026**.

A. TUJUAN : Meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur meningkatnya kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan adalah nilai tukar nelayan (NTN) yang dalam hal ini difokuskan kepada nelayan kecil karena sesuai dengan wewenang kabupaten/ kota yaitu Pemberdayaan Nelayan Kecil. NTN digunakan sebagai indicator meski kinerja juga meliputi kesejahteraan pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan karena pelaku utama yang dominan pada sector perikanan di Kota Batam adalah nelayan. Selain itu sebagian besar pelaku usaha budidaya ikan terutama budidaya laut dan pengolah hasil perikanan adalah anggota rumah tangga nelayan yang melakukan usaha alternative. Oleh sebab itu NTN dapat digunakan sebagai indicator untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan di Kota Batam.

Target NTN pada tahun 2022 adalah sebesar 101 dengan realisasi sebesar 101,08 . Capaian kinerja tersebut melebihi target dan berpredikat **sangat tinggi**.



Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	101	101,08	Melebihi Target

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan yang mencapai target karena didukung dengan peningkatan produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil yang merupakan sasaran strategis Dinas Perikanan.

NTN (nelayan kecil) dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3 Peningkatan Jumlah Produksi Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja	REALISASI		
		2020	2021	2022
1	Nilai Tukar Nelayan	100,30	100,50	101,08

B. SASARAN: Meningkatnya produksi nelayan kecil, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tersebut, ditetapkan tiga indikator yaitu:

- Persentase peningkatan produksi nelayan kecil;
- Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan;
- Persentase peningkatan produksi pengolah hasil perikanan.

1. Indikator ke-1: Persentase peningkatan produksi nelayan kecil .

Target peningkatan produksi nelayan kecil Tahun 2022 dalam Renstra 2021-2026 adalah 1% (206 ton) sedangkan realisasi peningkatan produksi nelayan kecil mencapai 1,05% (216 ton) atau melebihi target Renstra. Capaian kinerja tersebut berpredikat **sangat tinggi**.

**Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	%	1	1,05	Melebihi Target

Persentase peningkatan produksi nelayan kecil dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Peningkatan Jumlah Produksi Nelayan Kecil Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	1,01	2,87	1,05%

Peningkatan Produksi Nelayan Kecil Tahun 2022 sebesar 1,05% dibanding tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh meningkatnya pemberdayaan terhadap nelayan kecil yang meliputi:

- a. Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- b. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- c. Fasilitasi bantuan usaha/pembiayaan kepada nelayan kecil.
- d. Penyediaan data dan informasi perikanan tangkap yang sistematis.

Ketiga factor tersebut merupakan target kinerja eselon III dan eselon IV di Bidang Perikanan Tangkap, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Bidang Perikanan.

Tabel 3.6 Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Nelayan Kecil.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	%	1	1,05	Melebihi Target
	✓ Jumlah nelayan yang meningkat kapasitasnya	orang	54	56	Melebihi Target



	✓ Jumlah kelompok nelayan yang dibentuk dan dikembangkan	Kelompok	43	45	Melebihi Target
	✓ Jumlah unit usaha yang difasilitasi bantuan usaha/ pembiayaan	Unit	1.000	977	97,70%
	✓ Jumlah data dan informasi yang disediakan	dokumen	4	4	Mencapai Target

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran OP Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Pendukung

a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

Peningkatan kapasitas nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang paling menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan sarana/prasana perikanan tangkap yang dimiliki nelayan melalui pemberian bantuan sebanyak 33 unit alat penangkap ikan, 17 unit kapal penangkap ikan ukuran <5 GT, 3 unit mesin kapal dan 1 unit alat bantu penangkap ikan kepada 46 nelayan. Selain itu juga dengan meningkatkan pengetahuan nelayan terkait cara penangkapan ikan yang baik dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap 10 nelayan. Peningkatan jumlah armada perikanan tangkap nelayan kecil (ukuran ≤5 GT) dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.7 Peningkatan Jumlah Armada Nelayan Kecil Tahun 2018-2022

NO.	ARMADA	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Armada Tanpa Motor	1.734	1.812	1.836	1.836	1.851
2.	Armada Bermotor	7.099	6.142	6.994	7.028	7.043
	✓ Perahu Motor Tempel/ Ketinting	5.142	4.101	4.947	4.981	4.980
	✓ Kapal Motor ✓ < 5 GT	1.957	2.041	2.047	2.047	2.063
	Jumlah Armada Tangkap	8.823	7.954	8.830	8.864	8.894

Selain armada perikanan tangkap, peningkatan jumlah alat tangkap sangat mempengaruhi kenaikan jumlah produksis nelayan kecil.



Adapun peningkatan jumlah alat tangkap menurut jenis alat tangkap dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 3.8 Jumlah Alat Tangkap Ikan Tahun 2018 - 2022

NO.	JENIS ALAT TANGKAP	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jaring	166.072	166.743	166.750	166.996	170.704
	• Gillnet hanyut	4.350	4.370	4.370	4370	5.757
	• Jaring karang	139.417	139.720	139.720	139.950	141.370
	• Jaring bawal	8.082	8.082	8.082	8082	8.562
	• Jaring Apollo	14.179	14.527	14.527	14543	14.962
	• Jaring bilis	44	44	51	51	53
2.	Bubu	185.851	185.896	186.293	187.316	189.841
	• Bubu bento	150.198	149.996	150.293	151.056	153.296
	• Bubu Kawat	35.653	35.900	36.000	36.260	36.555
3.	Kelong	3.933	3933	3.935	3.989	4.005
	• Kelong pantai	3.844	3.844	3.844	3.899	3.915
	• Kelong bilis	89	89	91	90	90
4.	Pancing	172.330	171.285	171.285	171.799	172.227
	• Pancing rawai	162.378	161.244	161.244	161.244	162.144
	• Pancing	9.952	10.041	10.041	10.041	10.083
5.	Alat tangkap lain	502	514	557	514	474
JUMLAH		528.688	528.371	528.820	530.100	536.777

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut adalah Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 1 (satu) Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

b. Meningkatnya Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil

Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada nelayan kecil agar terbentuk kelembagaan yang kuat sehingga kegiatan produksi nelayan lebih tertata dan terorganisir. Peningkatan jumlah kelembagaan nelayan nelayan kecil dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.



Tabel 3.9 Jumlah Kelompok yang Dibentuk dan Dikembangkan Dinas Perikanan Tahun 2018 – 2022.

No.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah Kelompok Nelayan yang Dibentuk dan Dikembangkan	493	680	724	793	793
	Jumlah RTP	6.807	6.811	9.211	7.960	7.960

Dengan kuatnya kelembagaan nelayan telah terbentuk Forum Kelompok Usaha Bersama (FKUB) dimana FKUB nelayan kecil tersebut telah memiliki satu unit koperasi simpan pinjam yang diberi nama Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan Mina Batam Madani dan memiliki satu unit Gerai Nelayan yang menjual berbagai mesin dan alat penangkap ikan. Hingga Desember 2022 koperasi ini telah menghimpun dana yang berasal dari tabungan nelayan sebesar Rp. 4.969.409.974,-. Dari jumlah tersebut telah diberikan pinjaman kepada nelayan sebesar Rp. 1.072.545.929,- untuk keperluan produksi. Sedangkan aset Gerai Nelayan pada Tahun 2022 sebesar Rp.Nilai tabungan nelayan, besaran pinjaman yang diberikan serta aset Gerai Nelayan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3.10. Jumlah Tabungan Nelayan, Pinjaman yang Dikeluarkan dan Aset Gerai Nelayan Tahun 2019 - 2022.

NO.	URAIAN	TAHUN			
		2019 (miliar)	2020 (miliar)	2021 (miliar)	2022 (miliar)
1.	Nilai Tabungan	3,873	5,429	5,001	4,969
2	Pinjaman yang Diberikan	1,374	1,142	1,166	1,072
3	Aset Gerai Nelayan	2,362	2,889	2,880	2,913

c. Meningkatnya fasilitasi bantuan pembiayaan.

Peningkatan fasilitasi bantuan pembiayaan kepada nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara :

- Menerbitkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil.



Dengan diterbitkan rekomendasi tersebut nelayan kecil dapat membeli BBM subsidi dengan harga yang terjangkau sehingga kegiatan produksi nelayan dapat terlaksana dengan lancar. Selama Tahun 2022 telah dikeluarkan 8.067 rekomendasi kepada 977 nelayan. Perkembangan jumlah penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.11 Jumlah BBM dan Surat Rekomendasikan Tahun 2018 – 2022.

No.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah BBM (ltr)	6.044.601	780.588	3.187.430	1.181.858	3.231.179
	Solar (Gas Oil)	2.223.142	378.314	1.091.158	650.868	2.192.149
	Bensin (Premium)	3.821.459	402.274	2.096272	530.990	1.039.030
2.	Jumlah Surat/Rekomendasi BBM	1.422	1.633	4.528	1.948	8.067
	Solar/Gas Oil	NA	848	1.929	778	5.361
	Bensin/Premium/Pertalite	NA	785	2.599	11.170	2.706

- Fasilitasi pembuatan asuransi nelayan.

Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang mengandung risiko. Untuk itu nelayan sebaiknya memiliki jaminan asuransi kecelakaan kerja. Dinas Perikanan aktif memberikan sosialisasi kepada nelayan akan pentingnya memiliki asuransi kecelakaan kerja secara mandiri dan memfasilitasi nelayan agar mendapatkan bantuan asuransi tersebut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Perkembangan jumlah nelayan yang memiliki asuransi nelayan dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.



Tabel 3.12. Jumlah Nelayan yang Berasuransi Tahun 2018-2022.

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Nelayan Berasuransi		2504	451	1.028	1.237	1.237
1.	Mandiri (orang)	421	415	624	854	854
2.	BPAN KKP/ Pemprov. Kepri (orang)	30	613	613	613	415

d. Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Tangkap.

Salah satu hal penting yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan produksi nelayan kecil adalah ketersediaan data dan informasi. Dengan tersedianya data dan informasi yang sistematis dapat disusun rencana dan langkah yang tepat untuk dilakukan. Dokumen tersebut berisi data tentang jumlah produksi, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) nelayan, sarana/prasarana perikanan tangkap, dan nilai produksi nelayan. Perkembangan ketersediaan data dan informasi dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.13. Ketersediaan Data dan Informasi Tahun 2018-2022.

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokumen Data dan Informasi (dokumen)	4	4	4	4	4

2. Indikator ke-2: Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan

Target peningkatan produksi pembudidaya ikan Tahun 2022 dalam Renstra 2021-2026 adalah 2% (148 ton) sedangkan realisasi peningkatan produksi pembudidaya ikan mencapai 133,41% (9.833 ton) atau melebihi target Renstra. Capaian kinerja tersebut berpredikat **sangat tinggi**.

Tabel 3.14 Capaian Indikator ke-2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	%	2	133,41	Melebihi Target



Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini.

Tabel 3.15 Peningkatan Jumlah Produksi Pembudidaya Ikan Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan (%)	2,12	1.87	133,41%

Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan Tahun 2022 sebesar 133,41% dibanding tahun 2021. Peningkatan ini didukung kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil yang meliputi:

- a. Penyediaan sarana pembudidayaan ikan;
- b. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
- c. Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang sistematis;
- d. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan;
- e. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Variabel tersebut merupakan target kinerja eselon III dan Pejabat Fungsional di Bidang Perikanan Budidaya dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.

Tabel 3.16 Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Nelayan Kecil.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	%	2	133,41	Melebihi Target
	✓ Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang tersedia	unit	18	18	Mencapai Target
	✓ Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya yang teruji melalui	doku- men	6	12	Melebihi Target



	pengelolaan kesehatan ikan				
	✓ Jumlah data dan informasi yang disediakan	doku- men	4	4	Mencapai Target
	✓ Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan	orang	50	170	Melebihi Target
	✓ Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	kelom- pok	24	32	Melebihi Target

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran OP Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Pendukung

1) Penyediaan Sarana Budidaya Ikan

Peningkatan jumlah sarana budidaya merupakan salah satu faktor yang paling menunjang dalam peningkatan produksi pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan dengan cara pemberian bantuan sebanyak 18 unit/paket sarana produksi budidaya yang terdiri dari bibit ikan kerapu cantang berjumlah 9.000 ekor dan pakan sebanyak 1.000 kg. Peningkatan jumlah sarana budidaya (kolam, keramba dan tambak) dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.17 Jumlah Sarpras Budidaya Tahun 2018 - 2022

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	JUMLAH SAPRAS BUDIDAYA (kolam, keramba dan tambak)		1.984	2.012	2.059	2.096	2.082
1.	Air Tawar	Unit	1.398	1.402	1.406	1.407	1.407
2.	Air Payau	Unit	9	19	25	40	40
3.	Air Laut	Unit	585	591	628	649	635

2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya penting untuk dilakukan karena sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya.



Tabel 3.17 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Tahun 2018 - 2022

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan	dokumen	8	12	12	12	12

3) Penyediaan Data dan Informasi Perikanan Budidaya

Salah satu hal penting yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan produksi pembudidaya ikan adalah ketersediaan data dan informasi. Dengan tersedianya data dan informasi yang sistematis dapat disusun rencana dan langkah yang tepat untuk dilakukan. Dokumen tersebut berisi data tentang jumlah produksi, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) pembudidaya ikan, sarana/prasarana perikanan budidaya, dan nilai produksi budidaya. Perkembangan ketersediaan data dan informasi dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.18. Ketersediaan Data dan Informasi Tahun 2018-2022.

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokumen Data dan Informasi (dokumen)	4	4	4	4	4

4) Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan.

Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan perlu terus dilakukan agar para pembudidaya ikan tetap aktif berproduksi. Perkembangan rumah tangga perikanan (RTP) budidaya Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada table di bawah ini.



Tabel 3.19 Jumlah RTP Budidaya Tahun 2018 – 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
JUMLAH RTP BUDIDAYA			2.451	2.515	2.556	2.567	2.725
1.	Air Tawar	RTP	743	761	788	1.042	843
2.	Air Payau	RTP	68	83	92	103	128
3.	Air Laut	RTP	1.396	1.427	1.432	1.422	1.420
4.	Rumput Laut	RTP	80	80	80	80	80
5.	Ikan Hias	RTP	164	164	164	254	254

5) Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Peningkatan fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada nelayan kecil agar terbentuk kelembagaan yang kuat sehingga kegiatan produksi nelayan lebih tertata dan terorganisir. Peningkatan jumlah kelembagaan pembudidaya ikan kecil dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.20 Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Tahun 2018 – 2022.

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibentuk dan dikembangkan	242	246	275	313	192
Jumlah RTP	2.451	2.515	2.556	2.567	2.725

3. Indikator ke-3: Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan

Target peningkatan produksi pengolah hasil perikanan Tahun 2022 dalam Renstra 2021-2026 adalah 1% (12,24 ton) sedangkan realisasi peningkatan produksi pengolah hasil perikanan mencapai 9,87% (119,95 ton) atau melebihi target Renstra. Capaian kinerja tersebut berpredikat **sangat tinggi**.

**Tabel 3.21 Capaian Indikator ke-3**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	%	1	9,87	Melebihi Target

Persentase peningkatan produksi pembudidaya ikan dalam beberapa tahun dapat dilihat pada Tabel 3.22 di bawah ini.

Tabel 3.22 Peningkatan Jumlah Produksi Tahun 2020-2022

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	-12,08	-5,83	9,87%

Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Tahun 2022 sebesar 133,41% dibanding tahun 2021. Peningkatan ini didukung beberapa variable kinerja yang meliputi:

- a. Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- b. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan;
- c. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil;
- d. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Variabel tersebut merupakan target kinerja eselon III dan Pejabat Fungsional di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh.



Tabel 3.23 Capaian Indikator Pendukung Peningkatan Produksi Nelayan Kecil.

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	%	1	9,87	Melebihi Target
	✓ Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan	Unit usaha	24	24	Mencapai Target
	✓ Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan	ton	512	5.300,67	Melebihi Target
	✓ Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang terfasilitasi	Unit usaha	8	8	Mencapai Target
	✓ Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Data/informasi	12	12	Mencapai Target
	✓ Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan	kelompok	15	20	Melebihi Target

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran OP Dinas Perikanan

Indikator Kinerja Pendukung

1) Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dalam peningkatan produksi pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan mutu agar proses



dan hasil produksi memenuhi standar dan persyaratan. Pelaksanaan Bimbingan pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.24 Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan Tahun 2018 - 2022

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan		20	20	20	20	20

2) Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan

Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan penting dilakukan untuk peningkatan produksi usaha pengolahan. Upaya ini dilakukan dengan cara melaksanakan monitoring ketersediaan ikan dan melakukan sosialisasi gemar makan ikan agar konsumsi ikan meningkat dan menjadi pemicu peningkatan produksi usaha pengolahan. Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.25 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Tahun 2018 - 2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Konsumsi dan Usaha Pengolahan (ton)	2.431,40	2.196,78	4.779,40	281,12	5.300,67

3) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil penting dilakukan untuk peningkatan produksi usaha pengolahan. Upaya ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan sarana pengolahan kepada pengolah hasil perikanan skala kecil dan mikro. Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang terfasilitasi dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.



Tabel 3.26 Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Skala Mikro dan kecil yang Terfasilitasi Tahun 2018 - 2022

URAIAN	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pelaku Usaha Pengolahan Skala Mikro dan Kecil yang Terfasilitasi (unit usaha)	-	13	20	-	8

4) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Salah satu hal penting yang diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan produksi pengolah hasil perikanan adalah ketersediaan data dan informasi. Dengan tersedianya data dan informasi yang sistematis dapat disusun rencana dan langkah yang tepat untuk dilakukan untuk meningkatkan produksi. Dokumen tersebut berisi data tentang jumlah produksi, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) pengolah dan pemasar hasil perikanan, sarana/prasarana pengolahan dan pemasaran, ragam jenis olahan, nilai produksi pengolahan dan lainnya. Perkembangan ketersediaan data dan informasi dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 3.27 Ketersediaan Data dan Informasi Tahun 2018-2022.

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dokumen Data dan Informasi (dokumen)	4	4	4	12	12

5) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Skala Mikro

Peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil merupakan salah satu faktor yang turut menunjang dalam peningkatan produksi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan pembinaan kepada nelayan kecil agar terbentuk kelembagaan yang kuat sehingga kegiatan produksi pengolah hasil perikanan lebih tertata dan terorganisir. Peningkatan jumlah kelembagaan pengolah dan pemasar hasil perikanan dari tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table di bawah.



**Tabel 3.28 Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar
(Poklahsar) Hasil Perikanan Tahun 2018 – 2022.**

No.	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Hasil Perikanan	92	140	145	154	158
	Jumlah RTP	799	1.201	1.251	1.344	1.352



Tabel 3.29. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Pada Perjanjian Kinerja

No	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Penjelasan Perhitungan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Predikat Kinerja 2022	Bidang Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 6/5)	(8)	(9)
1.1.	Nilai Tukar Nelayan	(Indeks harga yang diterima nelayan / indeks harga yang dikeluarkan nelayan) x 100	Nilai	101	101,08	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PT, Bidang PB, Bidang PDSPP, Bidang PMPP
2.1.	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	[(jumlah produksi nelayan kecil tahun n – jumlah produksi nelayan kecil tahun n-1)/ jumlah produksi nelayan kecil tahun n-1] x 100%	%	1	1,05	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PT, dan Bidang PMPP
2.2.	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	[(jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n – jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n-1)/ jumlah produksi pembudidaya ikan tahun n-1] x 100%	%	2	133,41	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PB, dan Bidang PMPP
2.3.	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	[(jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun n – jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun n-1)/ jumlah produksi pengolah hasil perikanan tahun n-1] x 100%	%	1	9,87	Melebihi Target	Sangat Tinggi	Bidang PDSPP, dan Bidang PMPP



B. PENCAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 secara umum dinilai telah berhasil mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja 2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022. Penilaian ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.29. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dibandingkan Dengan Target Pada Perjanjian Kinerja. Dari hasil analisis diketahui bahwa semua sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, seluruh capaian kerjanya "**SANGAT TINGGI**".

Dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, keberhasilan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis diuraikan dalam bentuk pencapaian 4 (empat) jenis indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Batam. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut diketahui bahwa ada 4 (empat) Kinerja IKU mencapai diatas **100%** dengan predikat **SANGAT TINGGI**.

Adapun Capaian Kinerja Renstra 2021-2026 sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.25**. diuraian di bawah ini.

INDIKATOR KINERJA 1; Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada Renstra 2021-2026, target indicator kinerja 1 (NTN) pada akhir Renstra (2026) sebesar 103. Adapun realisasi kinerja 1 pada tahun evaluasi (2022) mencapai 101,08, sehingga capaian kinerja Renstra sampai Tahun 2022 adalah 98,14%.

INDIKATOR KINERJA 2; Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil

Target Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja 2 pada akhir Renstra (2026) sebesar 5%, sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil Kota Batam tahun evaluasi (2022) mencapai 1,05% sehingga **Capaian Kinerja Renstra** sampai tahun 2022 adalah 20%.



INDIKATOR KINERJA 3; Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan.

Target Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja 3 pada akhir Renstra (2026) sebesar 5%, sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan Kota Batam tahun evaluasi (2022) mencapai 133,41%. Meski capaian tahun 2022 melebihi target, tidak mempengaruhi besarnya target yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya yaitu sebesar 1%. **Capaian Kinerja Renstra** sampai tahun 2022 adalah 20%.

INDIKATOR KINERJA 3; Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan.

Target Renstra 2021-2026 Indikator Kinerja 3 pada akhir Renstra (2026) sebesar 5%, sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan Kota Batam tahun evaluasi (2022) mencapai 9,87%. Meski capaian tahun 2022 melebihi target, tidak mempengaruhi besarnya target yang harus dipenuhi pada tahun berikutnya yaitu sebesar 1%. **Capaian Kinerja Renstra** sampai tahun 2022 adalah 20%



Tabel 3.30. Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Renstra

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2022	Target dan Realisasi IKU Tahun 2022			Realisasi Capaian IKU Renstra s/d Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=6/4)
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan							
	Nilai Tukar Nelayan	Nilai	101	101	101,08	Melebihi Target	98,14
Sasaran : Meningkatnya Produksi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan untuk Meningkatkan Kesejahteraan							
1	Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil	%	1	1	1,05	Melebihi Target	20
2	Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan	%	2	2	133,41	Melebihi Target	20
3	Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan	%	1	1	9,87	Melebihi Target	20



3.2 REALISASI ANGGARAN

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2022

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk belanja Operasional dan belanja Modal lingkup Dinas Perikanan Kota Batam sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)-SKPD Dinas Perikanan Tahun 2022 dari Rp. 12.980.953.909,- menjadi Rp. 12.908.604.724,- telah direalisasikan sebesar Rp. 12.086.625.166,- sebagaimana pada Tabel di bawah.

Tabel 3.31 Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022.

No.	Jenis Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Operasional	12.800.699.724	12.018.777.166	93,89
2.	Belanja Modal	107.905.000	67.848.000	62,88
TOTAL		12.908.604.724	12.086.625.166	93,63

Dari Tabel 3.31 diketahui bahwa Capaian Kinerja serapan anggaran Tahun Anggaran 2022 adalah **93,63%** menunjukkan bahwa Capaian Kinerja predikat “**SANGAT TINGGI**”.

2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan

Tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara Capaian Input dan Capaian Output. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi *ouput* dengan realisasi *input*, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efisien* jika realisasi *ouput* sama atau melebihi target, sementara realisasi dana sama atau lebih rendah dari target, sedangkan *in-efisien* disebabkan realisasi *ouput* lebih rendah dari target, sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

Efektivitas adalah perbandingan antara *ratio* pencapaian *outcome* dengan *ratio* pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut *efektif* jika



pencapaian *outcome* sama, melebihi target atau seimbang dengan pencapaian *output*, sedangkan *in-efektif* disebabkan pencapaian *outcome* lebih rendah daripada pencapaian *output*.

Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 12.908.604.724,- (dua belas milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Realisasi Anggaran sebesar Rp. 12.086.625.166,- dengan penghematan sebesar Rp. 821.979.558,-.

Tabel 3.32 Anggaran, Realisasi, dan Sisa Anggaran Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022.

No.	Jenis Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)
1.	Belanja Operasional			
	APBD	12.873.048.909		
	APBD-Perubahan	12.800.699.724	12.018.777.166	871.967.223,90
2.	Belanja Modal			
	APBD	107.905.000		
	APBD-Perubahan	107.905.000	67.848.000	11.390.000,00
TOTAL ANGGARAN		12.908.604.724	12.086.625.166	821.979.558



Tabel 3.33 Analisa Efisiensi dan Efektif Kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022.

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN			EFISIENSI KEGIATAN	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1.	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.643.286.436	8.238.519.869	404.766.567	95,32 %	Kurang Efisien
2.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	169.893.928	145.656.657	24.237.271	85,73 %	Efisien
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	107.905.000	67.848.000	40.057.000	62,88 %	Sangat Efisien
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1.550.239.520	1.490.004.965	60.234.555	96,11 %	Kurang Efisien
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	161.730.000	156.055.800	5.674.200	96,49 %	Kurang Efisien
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkan					
6.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.601.015.260	1.443.274.200	157.741.060	90,15 %	Kurang Efisien
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					
7.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	364.093.400	260.684.400	103.409.000	71,60 %	Sangat Efisien
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					
8.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.638.020	34.283.200	1.354.820	96,20 %	Kurang Efisien
9.	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	274.803.160	250.298.075	24.505.085	91,08 %	Kurang Efisien
TOTAL		12.908.604.724	12.086.625.166	821.979.558	93,63 %	

Terdapat 8 (delapan) kegiatan dari Belanja Operasional dan 1 (satu) belanja Modal yang dilaksanakan Dinas Perikanan Tahun 2022, terdapat 2 (dua) kegiatan yang **Sangat Efisien**, 1 (satu) **Efisien**, dan 6 (enam) kegiatan yang **Kurang efisien** seperti yang tertera pada table 3.28 di atas.

Melihat Eektivitas kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2022 maka kegiatan dinilai dengan menilai realisasi rasio outcome terhadap realisasi rasio output input kegiatan tersebut. Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang efektif sebagaimana disajikan pada Tabel 3.34. dibawah ini.



Tabel 3.34. Tabel Analisa Efisiensi dan Efektif Kegiatan Anggaran Tahun 2022.

No.	KEGIATAN/ SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN			TARGET		REALISASI		EFISIEN (d : c) (j)=r (d/c)	EFEKTIVITAS (rasio d / rasio c) (k)
		Target (a)	Realisasi (Rp)	Sisa	Out put	Out come	Out put	Out come		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=r (d/c)	(k)
1.	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.643.286.436	8.238.519.869	404.766.567	100%	100 %	100%	100%	95,32 %	Efektif
2.	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	169.893.928	145.656.657	24.237.271	100%	100 %	100%	99,71%	85,73 %	Efektif
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	107.905.000	67.848.000	40.057.000	100%	100 %	100%	100 %	62,88 %	Efektif
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1.550.239.520	1.490.004.965	60.234.555	100%	100 %	100%	100 %	96,11 %	Efektif
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	161.730.000	156.055.800	5.674.200	100%	100 %	100%	100 %	96,49 %	Efektif
6.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.601.015.260	1.443.274.200	157.741.060	54 orang	1%	56 orang	1,05%	90,15 %	Efektif
7.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	364.093.400	260.684.400	103.409.000	18 unit	2%	18 unit	133,41%	71,60 %	Efektif
8.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	35.638.020	34.283.200	1.354.820	20 unit usaha	1%	20 unit usaha	9,87%	96,20 %	Efektif
9.	Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	274.803.160	250.298.075	24.505.085	512 ton	1%	5.300,67 ton	9,87%	91,08 %	Efektif
TOTAL		12.908.604.724	12.086.625.166	821.979.558						



3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terus dilakukan dengan upaya menyampaikan laporan realisasi anggaran Dinas Perikanan Kota Batam yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja dinas sebagaimana termuat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan Kota Batam terhadap Walikota Batam pada tahun 2022. Anggaran yang diperjanjikan dan dipertanggungjawabkan Kepala Dinas Perikanan pada Walikota sebagai Kepala Daerah sebesar **Rp. 12.908.604.724** (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*). Adapun Nilai realisasi anggaran sebesar Rp. 12.086.625.166 (*Dua Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah*). Penjabaran realisasi penggunaan anggaran tersebut terinci dalam penjabaran berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota

1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu kegiatan Tahun 2022 sebesar Rp. 8.643.286.436 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.238.519.869 (95,32%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan terrealisasi 100%.

1.2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pagu kegiatan sebesar Rp. 169.893.928 dengan realisasi sebesar Rp. 145.656.657 (85,73%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% dan terrealisasi 100%.

1.3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah

Pagu kegiatan sebesar Rp. 107.905.000 dengan realisasi sebesar Rp. 67.848.000 (62,88%). Indikator Kegiatan ini adalah tPersentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan terrealisasi 100%.



- 1.4. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah.
Pagu kegiatan sebesar Rp. 1.550.239.520 dengan realisasi sebesar Rp. 1.490.004.965 (96,11%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan terealisasi 100%.
- 1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah.
Pagu kegiatan sebesar Rp. 161.730.000 dengan realisasi sebesar Rp. 156.055.800 (96,49%). Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi dengan target 100% dan terrealisasi 100%.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- 2.1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
Masukan dana (input) kegiatan ini sebesar Rp. 1.601.015.260 dengan Realisasi Rp. 1.443.274.200 (90,15%). Indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya dengan target 3,2% dan terealisasi 3,2%.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- 3.1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
Masukan dana (input) kegiatan sebesar Rp. 364.093.400. dengan realisasi keuangan Rp. 260.684.400 (71,60%). Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) yang sudah memenuhi standar sesuai SOP dengan target 264 RTP dan terrealisasi 329 RTP.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- 4.1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
Masukan dana (input) kegiatan ini pada Tahun 2022 sebesar Rp. 35.638.020 dengan realisasi keuangan Rp. 34.283.200. Indikator



kinerja kegiatan ini adalah Cakupan unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina dengan target 20% dan terrealisasi 20%.

4.2. Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan dana (input) kegiatan ini pada Tahun 2022 sebesar Rp. 274.803.160 dengan realisasi keuangan Rp. 250.298.075. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah ketersediaan ikan konsumsi dengan target 52.304,61 ton dan terrealisasi 57.605,28 ton.



Tabel 3.35. Capaian Realisasi Keuangan 2022

NO.	URUSAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT 2020	TARGET OUTPUT 2022 (DPA 2022)	REALISASI OUTPUT 2022	KEUANGAN 2022		
									ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Urusan Kelautan dan Perikanan											
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupate/Kota	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	8.643.286.436	8.238.519.869	95,32
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	169.893.928	145.656.657	85,73
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	107.905.000	67.848.000	62,88
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	1.550.239.520	1.490.004.965	96,11
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layakfungsi	100%	100%	161.730.000	156.055.800	96,49



NO.	URUSAN DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT 2022	TARGET OUTPUT 2022 (DPA 2022)	REALISASI OUTPUT 2022	KEUANGAN 2021		
									ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi nelayan kecil	20.355 ton	20.742 ton	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang meningkat status kelasnya	3,2%	3,2%	1.601.015.260	1.443.274.200	90,15
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi pembudidaya ikan	7.527 ton	17.203 ton	Kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah rumah tangga perikanan (RTP) yang sudah memenuhi standar sesuai SOP	264 RTP	329 RTP	364.093.400	260.684.400	71,60
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolah hasil perikanan	1.316,43 ton	1.335,12 ton	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Cakupan unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina	20%	20%	35.638.020	34.283.200	96,20
					Kegiatan Penyediaan dan penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan ikan konsumsi	52.304,61 ton	57.605,28 ton	274.803.160	250.298.075	91,08



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

- 1) Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022 seluruhnya berpredikat diatas 91% "**SANGAT TINGGI**", adapun indikatornya adalah :
 1. Nilai Tukar Nelayan
 2. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil
 3. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan
 4. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan.
- 2) Capaian indicator kinerja Sasaran strategis dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : >100%
 2. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil : >100%
 3. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan : >100%
 4. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan : >100%
- 3) Capaian indicator kinerja Sasaran strategis dibandingkan dengan target Renstra sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) : 98,14%
 2. Persentase Peningkatan Produksi Nelayan Kecil : 20%
 3. Persentase Peningkatan Produksi Pembudidaya Ikan : 20%
 5. Persentase Peningkatan Produksi Pengolah Hasil Perikanan : 20%

4.2. Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022

Pagu anggaran belanja langsung APBD Kota Batam T.A. 2021 Dinas Perikanan Kota Batam untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target Indikator kinerja sebesar Rp. 12.908.604.724,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.086.625.166,- (Dua Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) capaian 93,63%.



4.3 Permasalahan

Beberapa permasalahan yang diinventarisasi berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2021, sebagai berikut :

- 1) Fasilitas dan infrastruktur dasar perikanan terutama budidaya ikan dan pengolahan ikan belum maksimal.
- 2) Kualitas SDA Perikanan perairan Kota Batam semakin menurun
- 3) Kualitas SDM nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah/pemasar hasil olahan belum memadai
- 4) Jumlah dan kapasitas tenaga pendamping lapangan perikanan belum memadai.

4.4 Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pagu anggaran untuk Fasilitas dan infrastruktur dasar perikanan terutama budidaya ikan dan pengolahan ikan.
- 2) Meningkatkan pagu anggaran armada dan alat tangkap ikan berkapasitas diatas 2 GT.
- 3) Meningkatkan intensitas kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolah/pemasar hasil perikanan.
- 4) Meningkatkan jumlah pendamping lapangan perikanan yang kapabel.

Semoga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kota Batam Tahun 2022** ini dapat menjadi informasi acuan dalam penyusunan perencanaan dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja yang semakin berkualitas dan mendorong tumbuhnya kesadaran individu dan kesadaran kolektif dalam mengembangkan etos kerja aparatur Dinas Perikanan untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kota Batam.

Batam, Februari 2023

**Kepala Dinas Perikanan
Kota Batam**

